BAB IV

ANALISIS KERJA PRAKTEK

4.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Analisa sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada yaitu sistem informasi administrasi pajak hotel yang sedang berjalan khususnya pada seksi pendaftaran dan pendataan (YANDU) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Prosedur administrasi pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Petugas menerima SPTPD dari Wajib Pajak yang sudah di isi dan ditandatangani kemudian memeriksa kesesuainya, jika SPTPD tidak sesuai maka dikembalikan laki ke Wajib Pajak tapi jika sesuai maka petugas menandatangani SPTPD tersebut dan menyerakannya kepada staf administrasi.
2. Bedasarkan SPTPD tersebut staf administrasi membuat himpunan untuk diserahkan ke seksi penetapan untk diproses.
3. Setalah SPTPD diterima maka SPTPD tersebut dihitung dan diproses untuk menghasikan SKPD.
4. Setalah SKPD selesai maka seksi penetapan member nomir sesua klasifikasnya.
5. SKPD yang telah diberikan nomor diserahkan kepada kepala Sub Dinas Pajak untuk ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke seksi penetapan.

6. Sesksi penetapan mendistrbusikan SKPD tersebut ke staf administrasi pada seksi pendaftaran dan pendataan untuk diserahkan kepada petugas dan diserahkan lagi ke Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima SKPD dari petugas.
8. BKP menyerahkan STPD dan BPPS kepada staf adminsitrasi
9. Staf administrasi membukukan Wajib Pajak yang sudah mebayar pajak.

4.1.1 Analisis Dokumen

Masukan yang digunakan untuk pembuatan administrasi pajak hotel adalah data yang berupa dokumen. Dokumen yang sedang berjalan adalah SPTPD, SKPD, STPD, BPPS.

Kebutuhan Input		
Nama Masukan	:	**Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**
Keterangan	:	Sebagai surat penagihan pajak
Media	:	Kertas
Distribusi	:	Wajib Pajak
Rangkap	:	5 (lima)
Frekuensi	:	672
Volume	:	2 kali per bulan
Retensi	:	Setiap tahun
Hasil Analisa	:	Informasi kadang kala tidak jelas

Tabel 4.1

Kebutuhan Output		
Nama Masukan	:	**Surat Ketetapan Pajak Daerah**
Keterangan	:	Sebagai surat untuk melakukan pembayaran pajak
Media	:	Kertas
Distribusi	:	Wajib Pajak
Rangkap	:	4 (empat)
Frekuensi	:	672
Volume	:	2 kali per bulan
Retensi	:	Setiap tahun
Hasil Analisa	:	

Tabel 4.2

Kebutuhan Input		
Nama Masukan	:	**Surat Tanda Terima Pajak Daerah (STPD)**
Keterangan	:	Sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SKPD
Media	:	Kertas
Distribusi	:	Wajib Pajak dan Petugas
Rangkap	:	4 (empat)
Frekuensi	:	672
Volume	:	2 kali per bulan
Retensi	:	Setiap tahun
Hasil Analisa	:	

Tabel 4.3

Kebutuhan Output		
Nama Masukan	:	**Buku Penerimaan Pajak Sejenis (BPPS)**
Keterangan	:	Sebagai laporan Wajib Pajak yang sudah membayar pajak
Media	:	Kertas
Distribusi	:	Staf administrasi

Rangkap	:	1 (satu)
Frekuensi	:	672
Volume	:	Setiap hari
Retensi	:	Setiap tahun
Hasil Analisa	:	

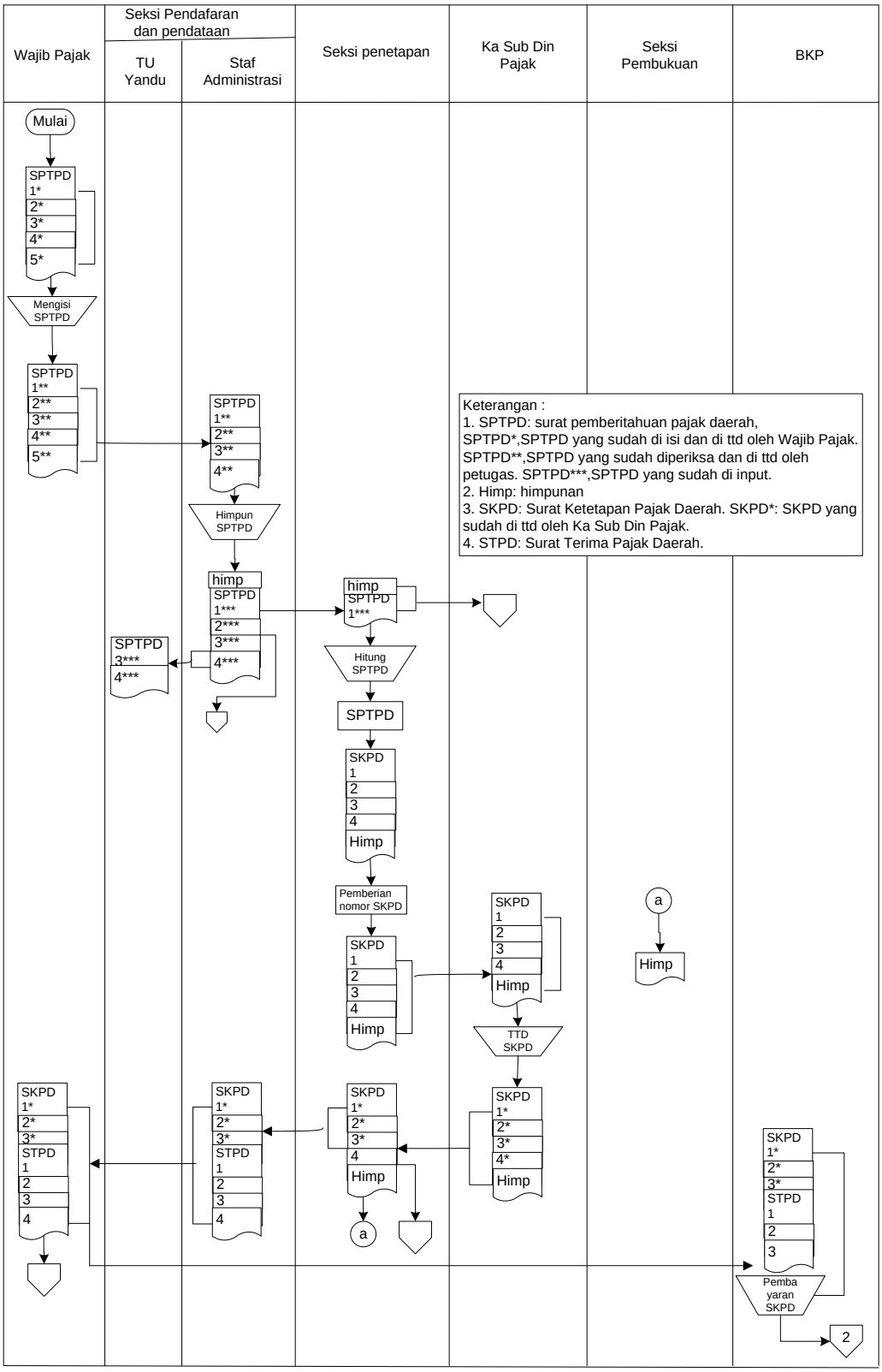
Tabel 4.4

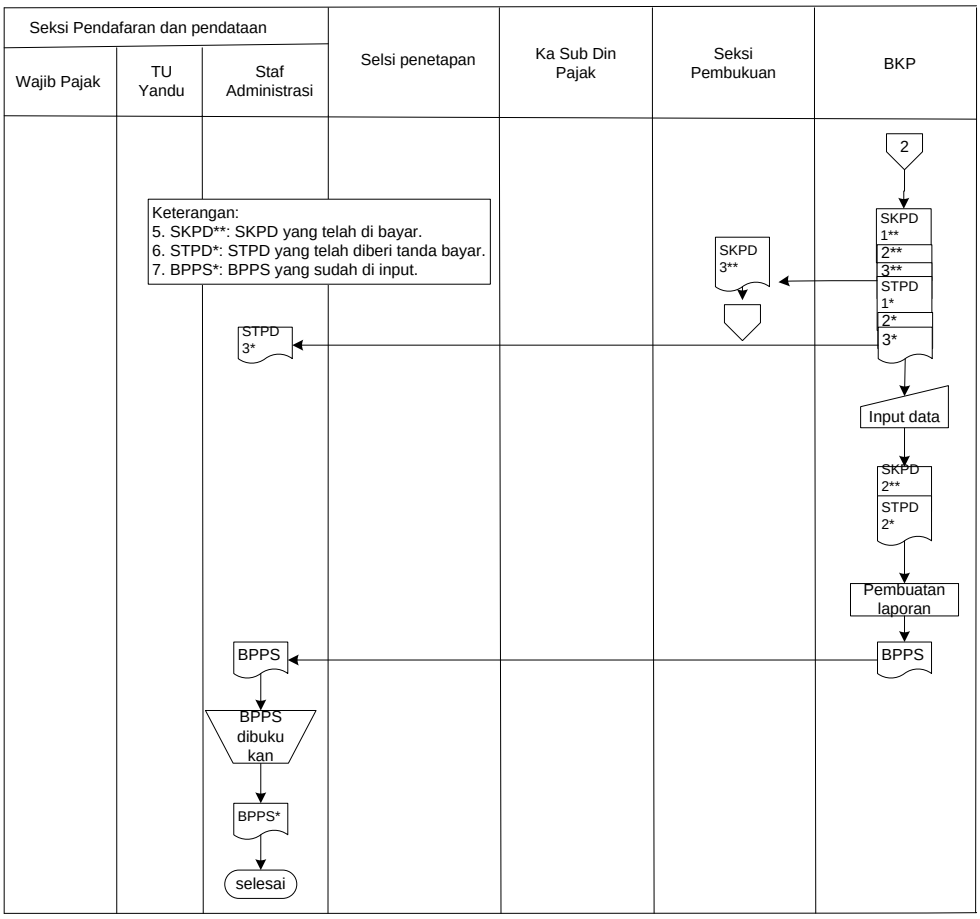
4.1.2 Analisis Prosedur yang Berjalan

Sesuai dengan prosedur sistem informasi administrasi pajak hotel yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat di analaisis secara bertahap menggunakan alat bantu yaitu Flow Map, Diagra Kontek dan DFD.

4.1.2.1 Flow Map

Sistem informasi administrasi pajak hotel yang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang sedang berjalan digambarkan dalam bentuk flow map sebagai berikut:


Wajib Pajak
Seksi Pendafaran dan pendataan
TU Yandu
Staf Administrasi
Seksi penetapan
Ka Sub Din Pajak
Seksi Pembukuan
BKP
Mulai
SPTPD 1* 2* 3* 4* 5*
Mengisi SPTPD
SPTPD 1** 2** 3** 4** 5**
SPTPD 1** 2** 3** 4**
Himpun SPTPD
himp SPTPD 1*** 2*** 3*** 4***
SPTPD 3*** 4***
himp SPTPD 1***
Hitung SPTPD
SPTPD
SKPD 1 2 3 4 Himp
Pemberian nomor SKPD
SKPD 1 2 3 4 Himp
SKPD 1 2 3 4 Himp
TTD SKPD
SKPD 1* 2* 3* 4* Himp
a
Himp
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3 4
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3 4
SKPD 1* 2* 3* 4 Himp
a
SKPD 1* 2* 3* 4* Himp
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3
Pemba yaran SKPD
2
Keterangan :
1. SPTPD: surat pemberitahuan pajak daerah, SPTPD*,SPTPD yang sudah di isi dan di ttd oleh Wajib Pajak. SPTPD**,SPTPD yang sudah diperiksa dan di ttd oleh petugas. SPTPD***,SPTPD yang sudah di input.
2. Himp: himpunan
3. SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah. SKPD*: SKPD yang sudah di ttd oleh Ka Sub Din Pajak.
4. STPD: Surat Terima Pajak Daerah.



Gambar 4.1

Flow Map Sistem yang Berjalan

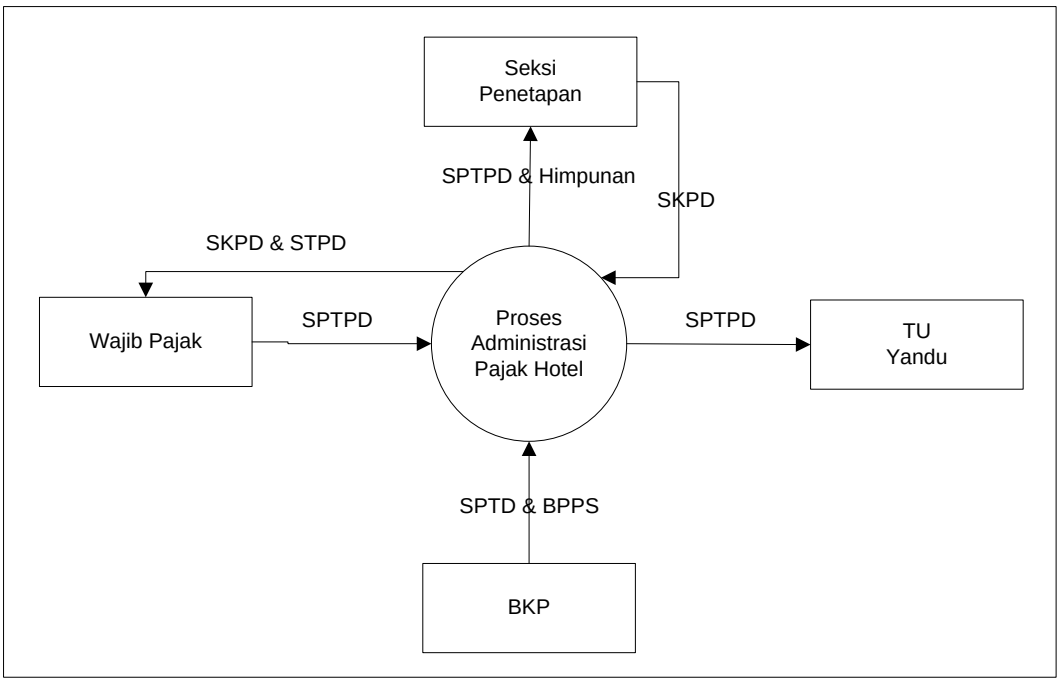
Uraian:

- Petugas Menerima SPTPD dari Wajib Pajak yang sudah diisi dan ditandatangan kemudian memeriksa kesesuaiannya. Kemudian petugas menandatangani SPTPD tersebut dan menyeraknnya kepada staf administrasi.
- Berdasarkan SPTPD tersebut staf administrasi membuat himpunan untuk diserahkan ke seksi penetapan untuk diproses.

- Setelah SPTPD diterima maka SPTPD tersebut dihitung dan diproses untuk menghasilkan SKPD.
- Setelah SKPD selesai maka seksi penetapan memberikan nomor sesuai klasifikasinya.
- SKPD yang telah diberikan nomor diserahkan kepada kepala Sub Dinas Pajak untuk ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke seksi penetapan.
- Seksi penetapan mendistribusikan SKPD tersebut ke staf administrasi pada seksi pendaftaran dan pendataan untuk diserahkan kepada petugas dan diserahkan kembali ke Wajib Pajak.
- Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima SKPD dari petugas.
- BKP menyerahkan STPD dan BPPS kepada staf administrasi.
- Staf Administrasi membukukan Wajib Pajak yang sudah membayar pajak.

4.1.2.2 Diagram Kontek

Diagram kontek merupakan diagram yang menggambarkan sistem dengan lingkungan luar. Diagram kontek dari sistem informasi administrasi pajak yang sedang berjalan dapat dilhat sebagai berikut:

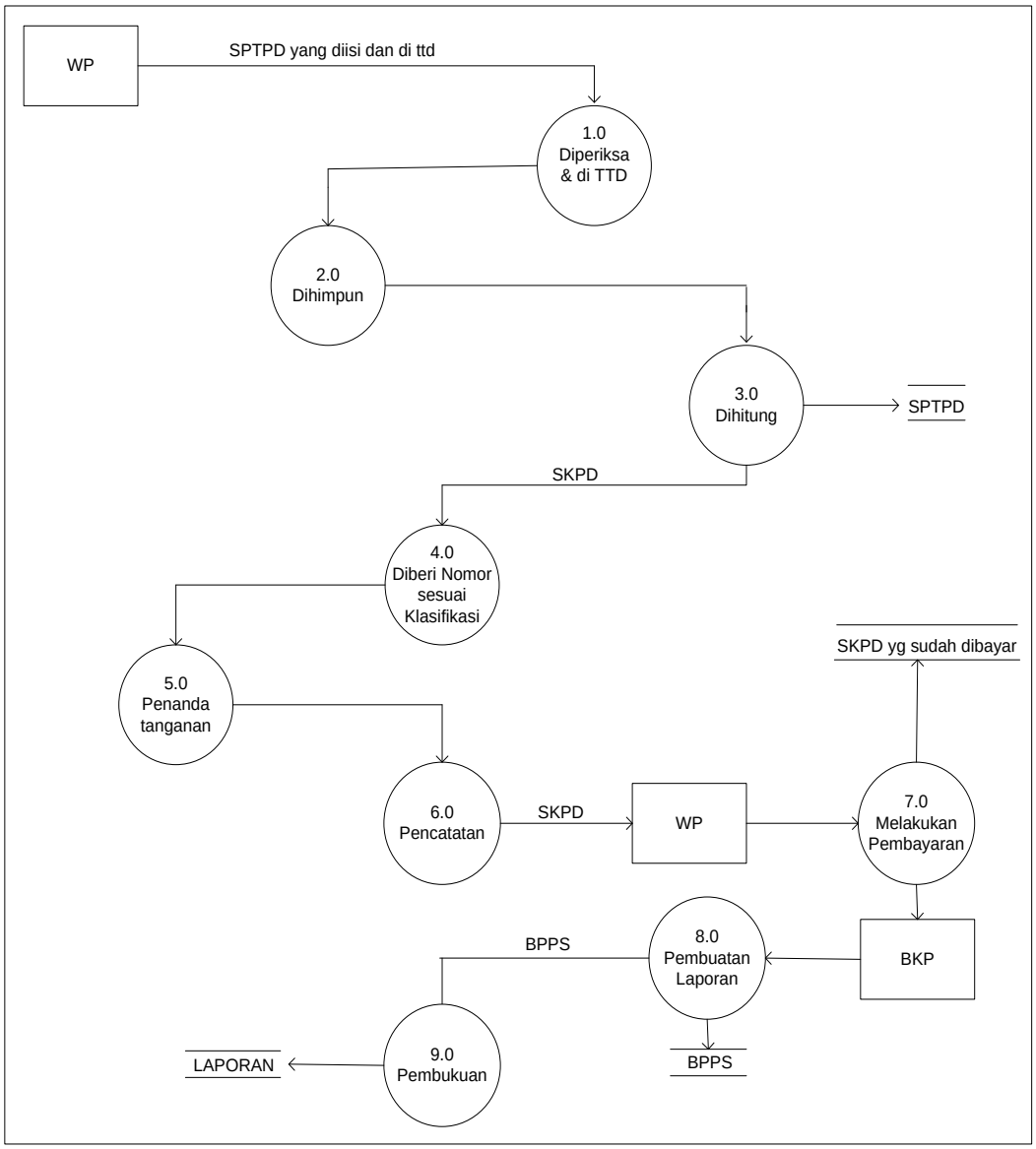


Gambar 4.2

Digram Konteks Yang Berjalan

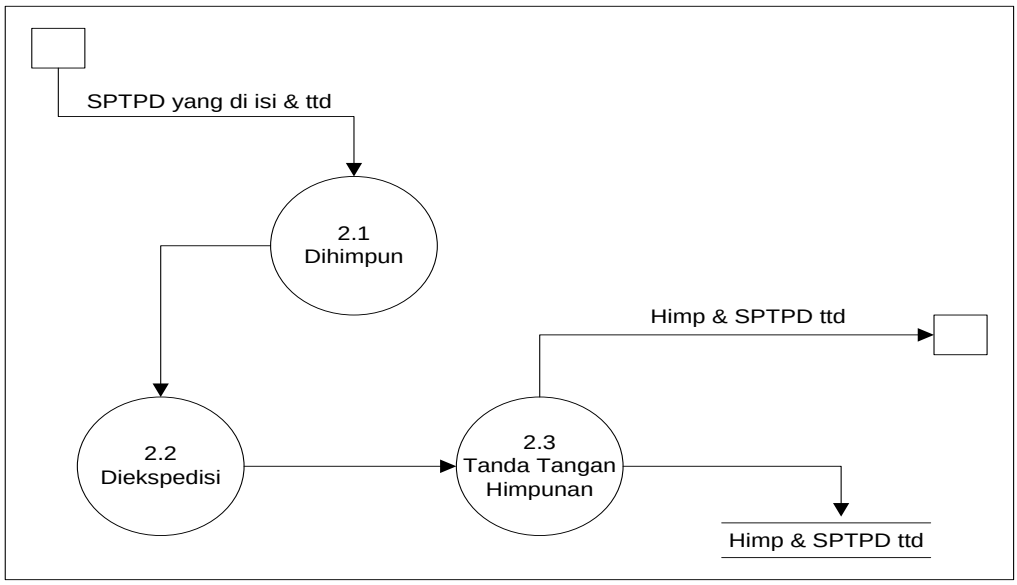
4.1.2.3 Data Flow Diagram

Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir. Data flow diagram dari sistem informasi administrasi pajak yang sedang berjalan dapat dilhat sebagai berikut:



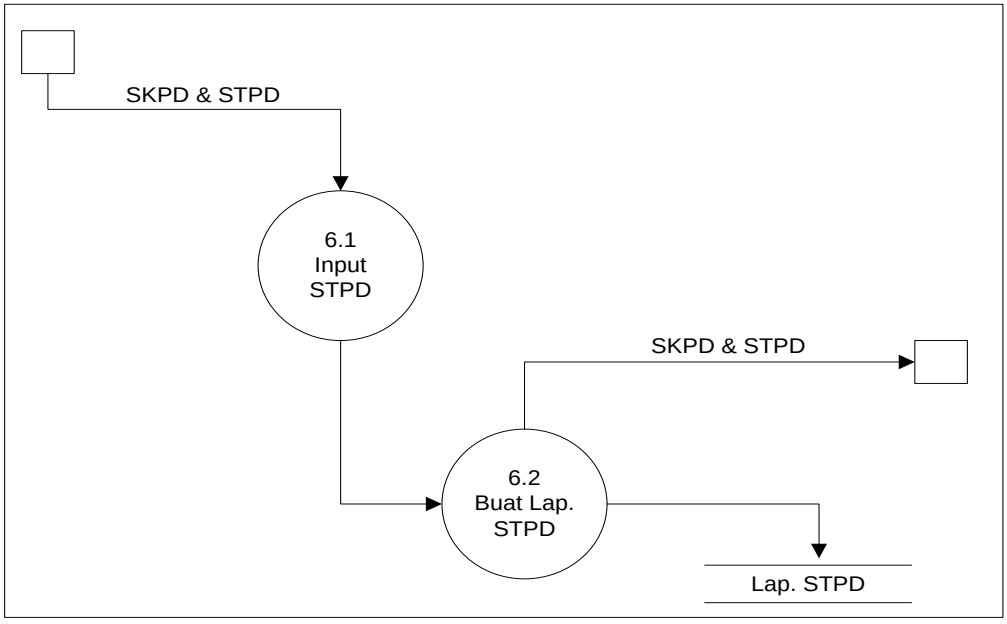
Gambar 4.3

Data Flow Diagram Level 0 yang Berjalan



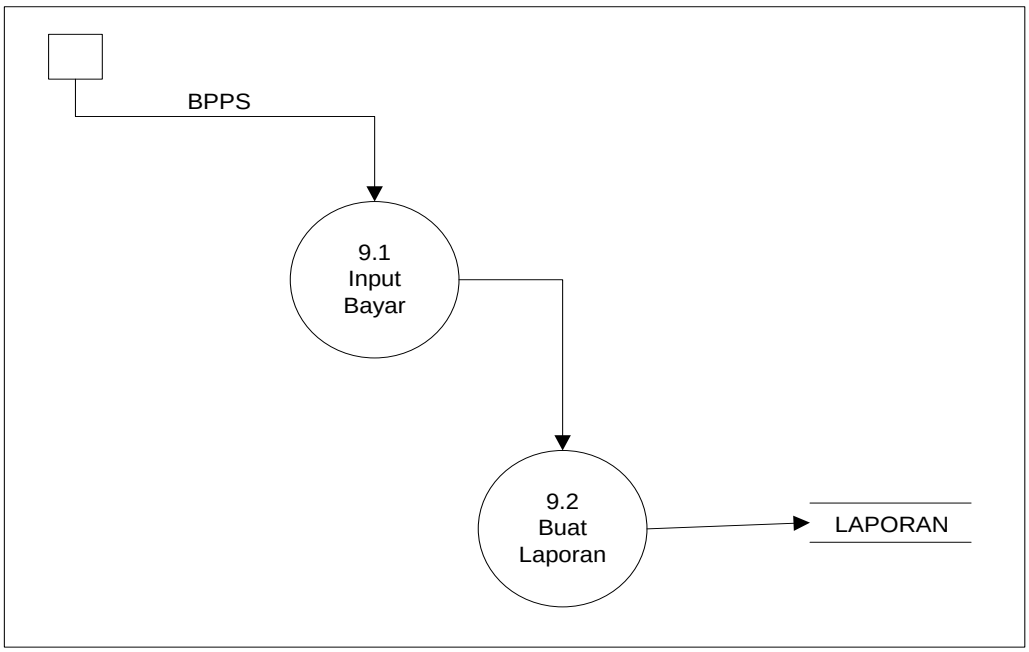
Gambar 4.4

Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.0



Gambar 4.5

Data Flow Diagram Level 1 Proses 6.0



Gambar 4.6

Data Flow Diagram Level 1 Proses 9.0

4.1.3 Evaluasi Sistem yang Berjalan

Setelah menganalisis smua sistem administrasi pajak yang berjalan, berdasarkan temuan masalah yang dikemukakan pada bab 1 (identifikasi masalah) yang mana permasalahan tersebut adalah hasil laporan relasi lamabat, hal ini di karenakan sistem yang diterapkan pada seksi pendaftaran dan pendataan (YANDU) belum dilakukan secara komputerisasi.

4..2 Usulan Rancangan Sistem

Untuk mengatasi persoalan, penulis mengusulkan suatu sistem pembuatan laporan yang lebih efektif. Fasilitas yang disediakan adalah sistem pembuatan laporan realisasi per periode(perbulan).

4.2.1 Tujuan Perancangan Sistem

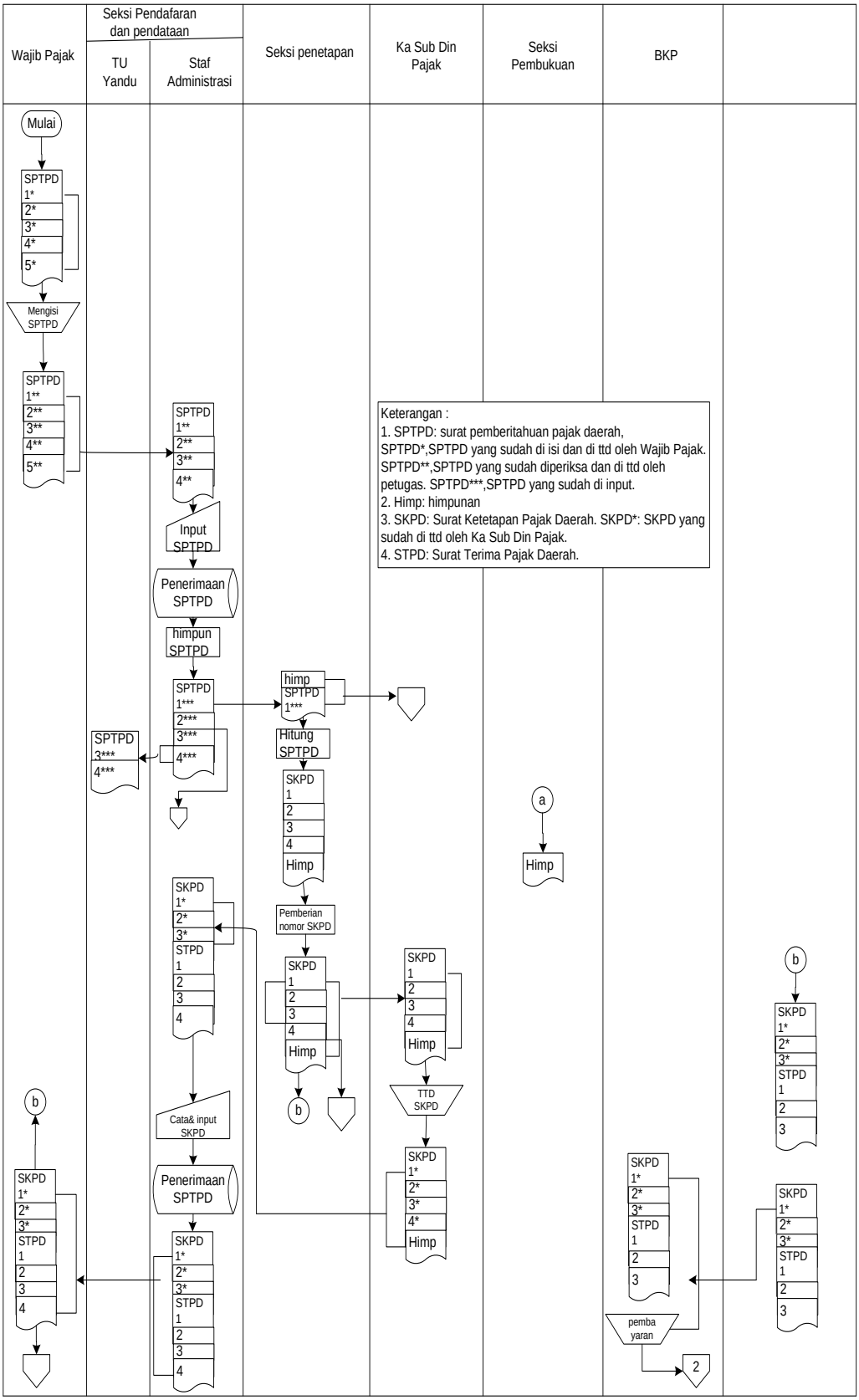
Berdasarkan rancangan yang akan dibuat penulis bertujuan yang ingin di capai dengan sistem baru ini adalah ketepatan dan kecepatan. Ketepatan berarti sistem ini dalama melakukan proses akan bekerja sesuai dengan informasi yang didapatkan. Kecepatan berarti informasi yang diberikan akan lebi cepat didapatkan yang akan mempengaruhi terhadap kecepatan waktu yang telah ditentukan dalam menangani pengadministrasian realisasi pajak hotel sehingga dapat disimpulkan dengan sistem yang baru ini segala informasi yang diperlukan akan lebih sempurna.

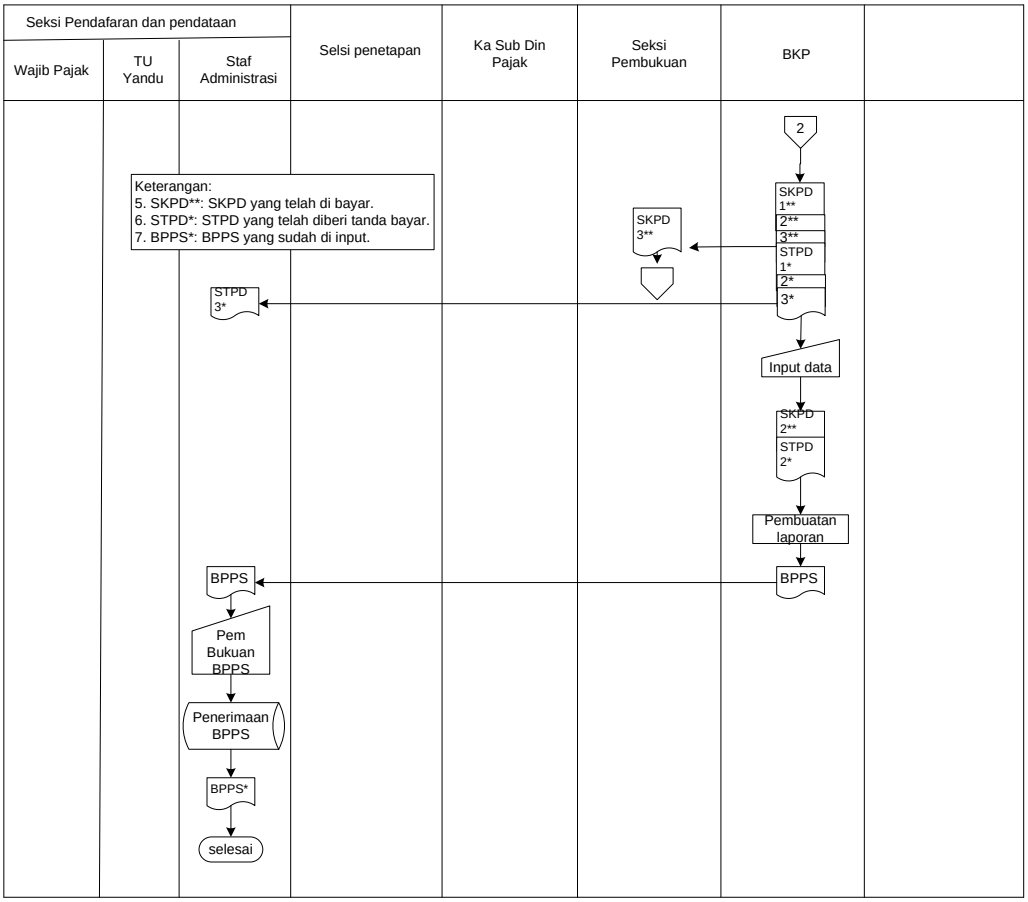
4.2.2 Perancangan Prosedur yang Diusulkan

Prosedur sistem administrasi pajak hotel yang diusulkan sebagai berikut:

4.2.2.1 Flow Map Usulan

Berikut ini adalah flow map yang di usulkan:


Wajib Pajak
Seksi Pendafaran dan pendataan
TU Yandu
Staf Administrasi
Seksi penetapan
Ka Sub Din Pajak
Seksi Pembukuan
BKP
Mulai
SPTPD 1* 2* 3* 4* 5*
Mengisi SPTPD
SPTPD 1** 2** 3** 4** 5**
SPTPD 1** 2** 3** 4**
Input SPTPD
Penerimaan SPTPD
himpun SPTPD
SPTPD 1*** 2*** 3*** 4***
SPTPD 3*** 4***
himp SPTPD 1***
Hitung SPTPD
SKPD 1 2 3 4 Himp
Pemberian nomor SKPD
SKPD 1 2 3 4 Himp
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3 4
Cata& input SKPD
Penerimaan SPTPD
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3 4
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3 4
SKPD 1 2 3 4 Himp
TTD SKPD
SKPD 1* 2* 3* 4* Himp
a
Himp
b
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3
SKPD 1* 2* 3* STPD 1 2 3
pemba yaran
2
Keterangan :
1. SPTPD: surat pemberitahuan pajak daerah, SPTPD*,SPTPD yang sudah di isi dan di ttd oleh Wajib Pajak. SPTPD**,SPTPD yang sudah diperiksa dan di ttd oleh petugas. SPTPD***,SPTPD yang sudah di input.
2. Himp: himpunan
3. SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah. SKPD*: SKPD yang sudah di ttd oleh Ka Sub Din Pajak.
4. STPD: Surat Terima Pajak Daerah.



Gambar 4.7

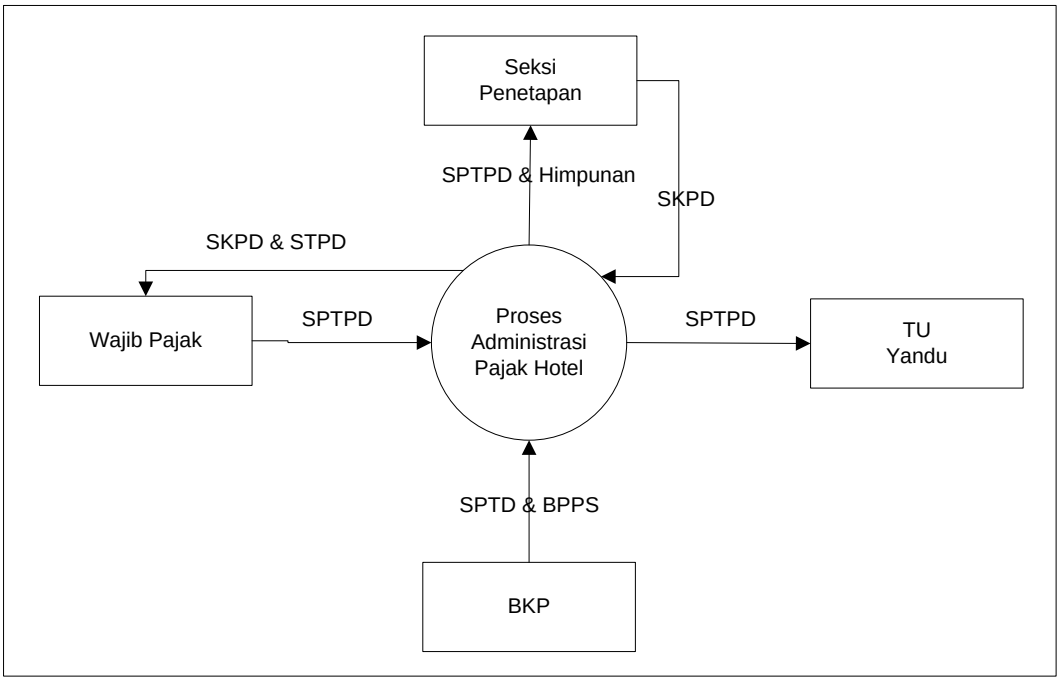
Flow Map Usulan

Uraian:

- Petugas pendaftaran dan pendataan menerima SPTPD dari Wajib Pajak yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak kemudian memeriksa kesesuainnya. Jika sesuai maka petugas menandatangani SPTD tersebut, tapi jika tidak sesuai maka SPTD tersebut diserahkan kembali kepada Wajib Pajak untuk diperbaiki.
- SPTD yang telah ditandatangani oleh petugas akan diberikan ke staf administrasi untuk di himpun.

- Setelah SPTPD dihimpun, maka SPTD dan himpunan tersebut diserahkan ke seksi penetapan untuk dihitung dan diproses menajadi SKPD.
- SKPD yang telah selesai akan diberi nomor sesuai kalsifikasinya.
- Setelah diberi nomor maka SKPD tersebut olhe seksi penetapan akan diserahkan kepada kepala Sub Dinas Pajak untuk di tandatangani.
- SKPD yang telah ditandatangani akan diserahkan ke staf administrasi di seksi pendaftaran dan pendataan untuk dicatat.
- Setelah dicatat maka SKPD akan diserahkan ke petugas untuk diserahkan pada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak akan melakukan pembayaran di BKP setelah menerima SKPD dari petugas.
- Berdasarkan pembayaran tersebut BKP akan menginput data.
- Setelah data di input ke database dan akan menghasilkan sebuah laporan untuk diserahkan kepada staf administrasi seksi pendaftaran dan pendataan.
- Staf administrasi menerima laporan dari BKP yang kemudian laporan tersebut di input ke database staf administrasi sebagai laporan realisasi pembayaran pajak.

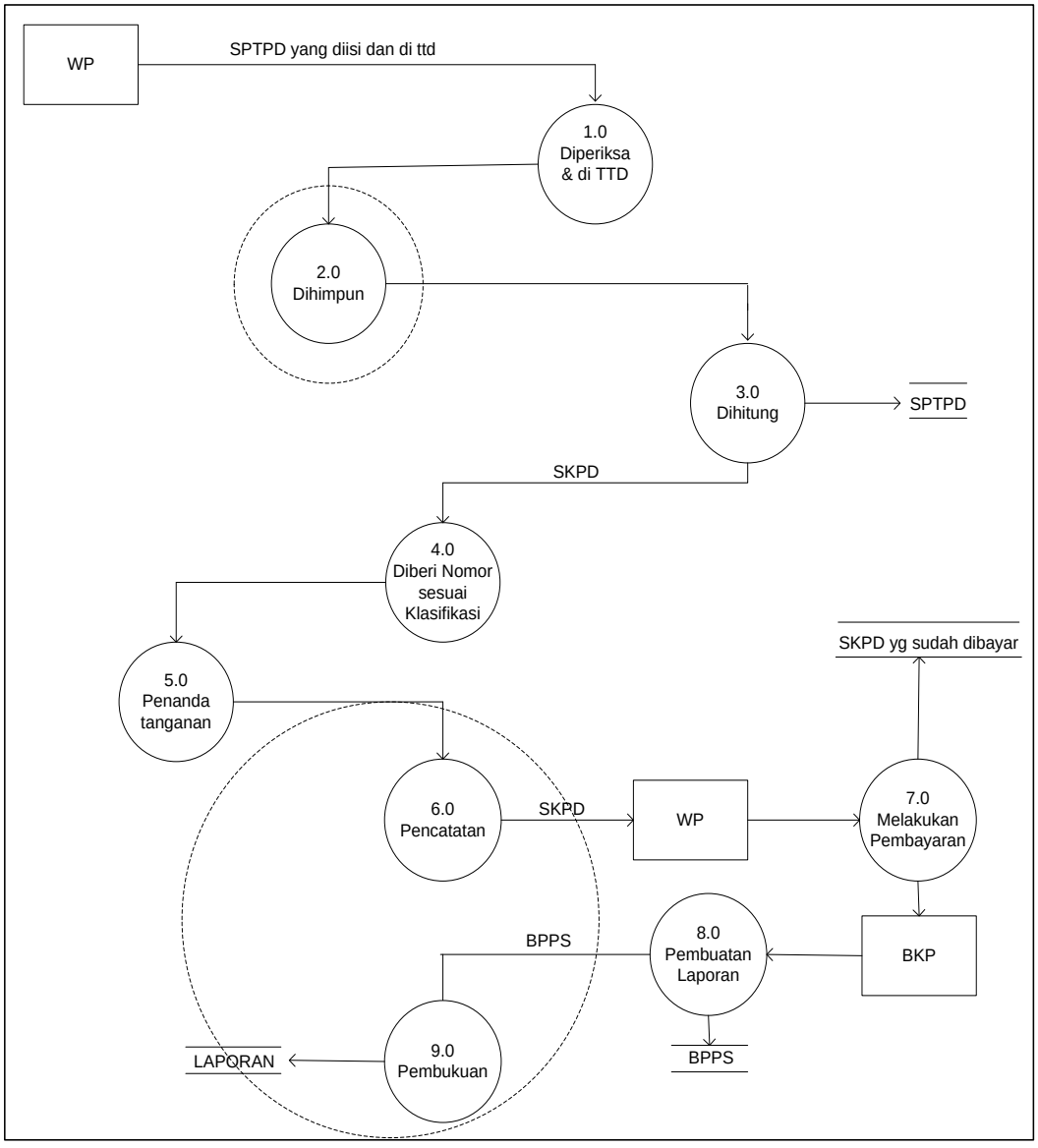
4.2.2.2 Diagram Kontek



Gambar 4.8

Diagram Konteks Usulan

4.2.2.3 Data Flow Diagram



Gambar 4.9

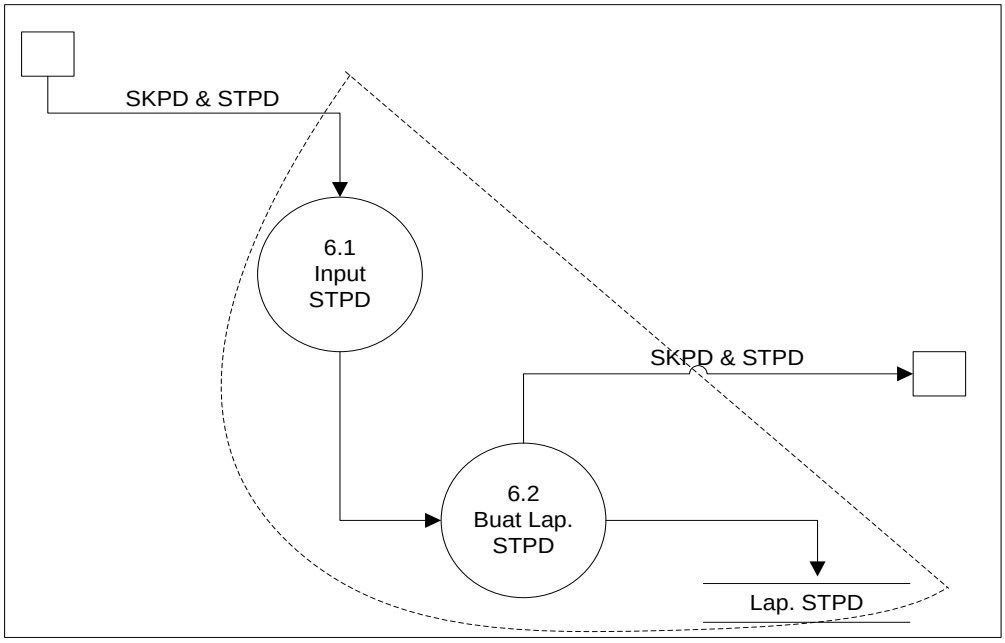
DFD Usulan Level 0

SPTPD : Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

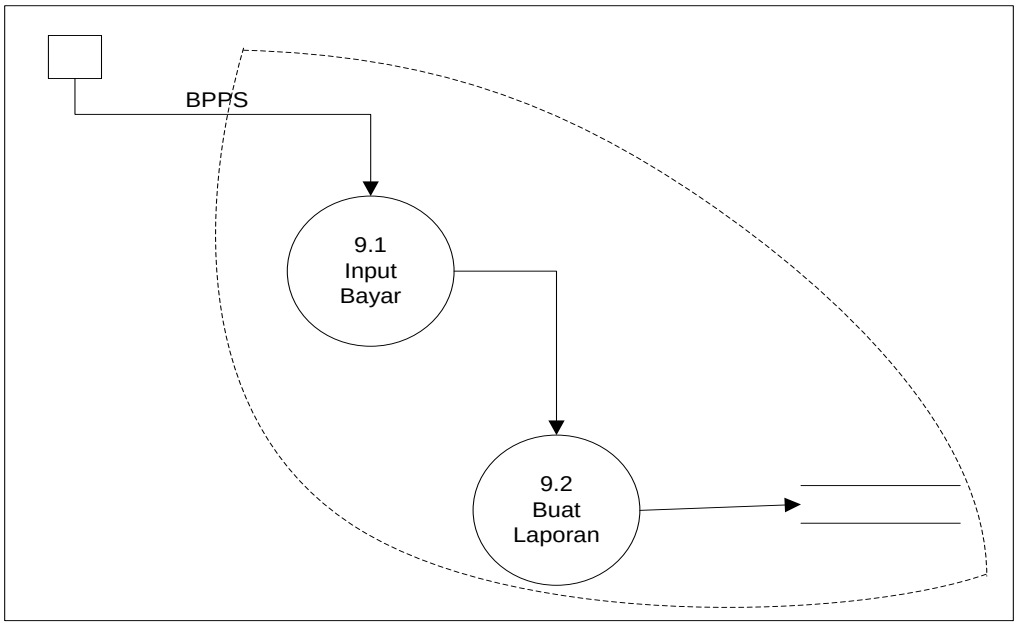
BPPS : Buku Penerimaan Pajak Sejenis

-------- :



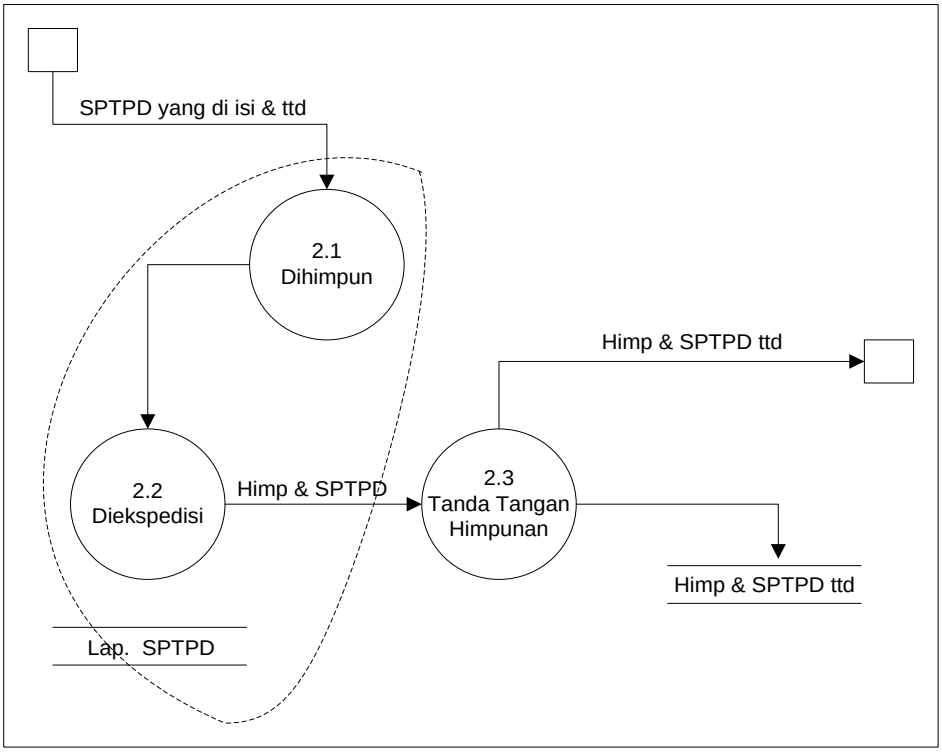
Gambar 4.10

DFD Usulan Level 1 Proses 6.0



Gambar 4.11

DFD Usulan Level 1 Proses 9.0



Gambar 4.12

DFD Usulan Level 1 Proses 2.0

4.2.2.4 Kamus Data

Nama Masukan	:	Data Wajib Pajak (WP)
Keterangan	:	Sebagai Data Wajib Pajak
Sumber	:	Subdin Pajak & DIparda
Distribusi	:	Dispenda
Fekuensi	:	672 (2masa x 28 WP x 12 bulan)
Volume	:	
Retensi	:	

Tabel 4.5

Nama Masukan	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daetah (SPTPD)
Keterangan	:	Sebagai surat penagiahan pajak
Sumber	:	Subdin Pajak
Distribusi	:	Wajib Pajak
Fekuensi	:	672 (2masa x 28 WP x 12 bulan)
Volume	:	2 kali per bulan
Retensi	:	Setiap Tahun

Tabel 4.6

Nama Masukan	:	Surat Tanda Terima Pajak Daerah (STPD)
Keterangan	:	Sebagai tanda bukti bahwa WP telah menerima SKPD
Sumber	:	Subdin pajak
Distribusi	:	Wajib Pajak dan Petugas
Fekuensi	:	672 (2masa x 28 WP x 12 bulan)
Volume	:	2 kali per bulan
Retensi	:	Setiap tahun

Tabel 4.7

Nama Masukan	:	Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BBPS)
Keterangan	:	Sebagai tanda bukti bahwa WP telah melakukan pembayaran pajak
Sumber	:	BKP
Distribusi	:	Staf administrasi
Fekuensi	:	672 (2masa x 28 WP x 12 bulan)
Volume	:	Setiap hari
Retensi	:	Setiap tahun

Tabel 4.8